

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terwujudnya *good governance* adalah cita-cita dan impian yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Salah satu penerapan *good governance* yakni terciptanya penyelenggaraan keuangan negara yang baik. Keuangan negara perlu dikelola secara baik dan benar karena keuangan negara memiliki andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia.

Untuk merealisasikan hal tersebut, lahirlah satu Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Keuangan Negara (UU No. 17/2003), Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004) yang sekaligus merupakan *highlight* dari BAB VII (Pelaksanaan APBN Dan APBD) UU No. 17/2003, dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15/2004).

Sebagaimana tertera pada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka,

dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diterbitkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah yang menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. SAP terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan masing-masing akun atau transaksi.

Menurut PSAP 07, pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan pada kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap memiliki jumlah yang signifikan pada setiap entitas pemerintah. Pada umumnya aset tetap memiliki nilai yang paling besar apabila dibandingkan dengan akun lain pada Laporan Keuangan. Keberadaan aset tetap juga memiliki pengaruh yang besar pada kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya, pengelolaan aset tetap merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pengelolaan aset tetap harus dilaksanakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta asas kepastian nilai.

Dengan memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan aset tetap maka perolehan aset dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Di

samping itu, hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja aset dan kinerja lembaga pemerintah. (Hasan, 2019)

Meskipun SAP dan asas-asas pengelolaan aset sudah ditetapkan cukup lama, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak kekurangan, sebagai contoh pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan pada pengelolaan aset tetap pada K/L. Permasalahan tersebut diantaranya adalah terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dan terdapat beberapa aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau biasa disingkat BPOM RI adalah sebuah lembaga di Indonesia dengan tugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Obat dan makanan yang dimaksud terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM RI menjadi objek yang menarik untuk dibahas oleh penulis karena pada tahun 2019, BPOM mendapat apresiasi dari BPK atas upaya yang telah dilakukannya sehingga dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, anggota VI BPK menyayangkan masih adanya temuan berulang pada pemeriksaan LK TA 2018. Penyebab utama terjadinya temuan-temuan berulang ini adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI)

yang dirancang dan diimplementasikan belum dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan melakukan tinjauan terhadap perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di BPOM RI dengan cara membandingkan praktik yang ada di lapangan dengan segala peraturan dan informasi terkait. Perlakuan akuntansi aset tetap yang baik merupakan hal yang penting karena aset tetap sangat berperan dalam aktivitas operasional BPOM RI secara langsung maupun tidak langsung. Aset tetap merupakan aset yang penting bagi entitas selain karena digunakan sebagai modal kerja, tetapi juga digunakan sebagai alat investasi jangka panjang bagi entitas. Mengingat bahwa tujuan dari pengadaan aset tetap adalah untuk modal kerja dan tidak untuk diperjual belikan, maka proses pengadaan serta cara perolehannya juga harus diperhitungkan secara tepat. Penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas implementasi akuntansi aset tetap di dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Praktik Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akuntansi aset tetap pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun anggaran 2020?

2. Apakah praktik akuntansi aset tetap pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Menjelaskan terkait praktik akuntansi aset tetap pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
2. Melakukan tinjauan kesesuaian praktik akuntansi aset tetap pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berfokus pada pembahasan terkait pendefinisian dan pengklasifikasian aset tetap, pengakuan dan pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap, serta kesesuaian praktik akuntansi aset tetap pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun anggaran 2020 dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam penyusunannya, penulis menggunakan data yang berasal dari Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun anggaran 2020 yang merupakan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan KTTA ini merupakan kontribusi serta bukti implementasi atas apa yang telah dipelajari oleh penulis terutama dalam hal aset tetap selama masa perkuliahan.
2. Penyusunan KTTA ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai penerapan serta pengelolaan praktik akuntansi aset tetap di sektor pemerintahan.
3. Penyusunan KTTA ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada para pembaca khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengenai kesesuaian antara penerapan serta pengelolaan praktik akuntansi aset tetap dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran umum dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini yakni dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan teori serta ketentuan yang relevan dengan implementasi akuntansi aset tetap yang akan dijadikan landasan dan acuan oleh penulis untuk

melakukan tinjauan atas praktik akuntansi aset tetap pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam menyusun KTTA, penjelasan mengenai informasi terkait segala hal yang membantu penulis dalam memecahkan rumusan masalah yang ada, serta pemaparan hasil data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan penutup atas hasil tinjauan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan harapan hasilnya membawa manfaat bagi para pembaca